

PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PLASTIK ANTAR NEGARA DALAM PERSPEKTIF POLITIK HIJAU: KASUS PENCEMARAN DI DESA TROPODO, JAWA TIMUR

Gusti Patading¹⁾

¹⁾Universitas Pelita Harapan, Tangerang

ABSTRACT

The discourse on global environmental problems is represented by two contrasting approaches namely Environmentalism and Ecology. Environmentalists are optimistic that the environmental crisis can be resolved by advancing science achieved by humanity and the ability to work together to solve problems in the form of international institutions and regimes. On the other hand, Green Politics that embraces Ecology sees the environmental crisis by first directing attention to the cause of the problem instead of directly trying to offer a solution. Ecologism considers the idea of economic development and institutions that continue to perpetuate it as the main source of problems. From this point of view, Green Politics explains the case of environmental pollution in Tropodo Village, East Java as an alternative view.

ABSTRAK

Diskursus mengenai masalah lingkungan global diwakili oleh dua pendekatan yang kontras yakni Environmentalisme dan Ekologisme. Kaum environmentalist optimis bahwa krisis lingkungan dapat diselesaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan yang dicapai umat manusia serta kemampuan bekerjasama menyelesaikan masalah dalam bentuk institusi dan regime internasional. Di sisi lain, Politik Hijau yang menganut Ekologisme melihat krisis lingkungan dengan terlebih dahulu mengarahkan perhatian pada penyebab terjadinya permasalahan tersebut alih-alih langsung berusaha menawarkan solusi. Ekologisme menunjuk pada ide pembangunan ekonomi serta istitusi-institusi yang terus melanggengkannya sebagai sumber pokok permasalahan. Dari sudut pandang inilah Politik Hijau menjelaskan kasus pencemaran lingkungan di Desa Tropodo, Jawa Timur sebagai sebuah pandangan alternatif.

1. PENDAHULUAN

Keprihatinan mengenai masalah lingkungan secara global menjadi satu bidang kajian yang semakin mendapat perhatian dari para penstudi Hubungan Internasional. Ancaman terhadap lingkungan menjadi keprihatinan bersama baik dalam kerangka kerjasama antar negara maupun sebagai keprihatinan masyarakat global. Namun diakui pula bahwa isu lingkungan merupakan bahasan yang relative baru dalam HI, seperti yang diungkapkan Steans dan Pettiford (2009:378) bahwa HI benar-benar mulai memikirkan isu lingkungan hidup secara lebih serius tidaklah muncul sebelum Perang Dingin berakhir.

Kesalingtergantungan (*interdependence*) antar negara dapat secara nyata terlihat dari penanganan isu-isu lingkungan seperti pemanasan global dan perubahan iklim, pencemaran laut dan lain sebagainya. Namun, untuk masalah lingkungan tertentu seperti polusi udara maupun tanah tidak biasanya mendapat perhatian secara global karena

dampaknya yang cenderung bersifat lokal atau terbatas pada negara yang bertetangga. Tingkat pencemaran udara yang sangat buruk di China mengakibatkan kematian hampir setengah juta penduduk China setiap tahunnya namun sangat sedikit berdampak bagi warga negara lain (Goldstein, 2014: 438).

Meski jarang dibahas secara global namun tidak berarti isu pencemaran tidak memiliki dimensi global. Penyebab dari pencemaran sangat terkait dengan aktivitas ekonomi global. Pada 1988 misalnya kasus pengiriman limbah antar negara sempat menyita perhatian dunia ketika dua kapal asal Italia pengangkut limbah beracun yakni Karin B dan Pelicano berlayar dari Pelabuhan ke Pelabuhan karena tidak ada negara yang bersedia menampungnya. Tidak hanya memicu gelombang protes dari aktivis pemerhati lingkungan, kejadian ini juga menimbulkan ketegangan politik antara Italia dan beberapa negara Eropa lain seperti Inggris,

Perancis, Spanyol, Jerman Barat dan Belanda (Greenhouse, S. 1988).

Pencemaran tanah dan polusi udara yang terjadi di Tropodo, sebuah desa di Sidoarjo, Jawa Timur bersumber dari pembakaran limbah plastik. Sampah plastik tersebut berasal dari negara-negara seperti AS dan Eropa Barat. Tulisan ini hendak memperlihatkan bagaimana pemikiran Politik Hijau sebagai salah satu pendekatan kontemporer dalam HI yang berlandaskan ekologisisme sebagai pandangan alternatif terhadap pendekatan optimistik modernisme yang menganut environmentalisme dalam melihat isu lingkungan hidup khususnya kasus pencemaran lingkungan.

2. LITERATURE REVIEW

Pembangunan dan Krisis Lingkungan

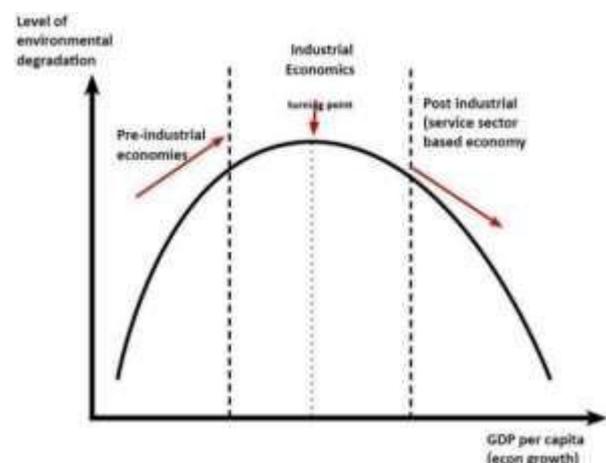
Ketika membahas lingkungan dan populasi, Joshua Goldstein menunjukkan permasalahan terkait konsep *Sustainable Development*, sebuah konsep yang melihat pertumbuhan ekonomi sebagai fokus utama sehingga kelestarian lingkungan dilihat dalam rangka memastikan pertumbuhan tersebut dapat berlangsung secara berkesinambungan (Goldstein 2014:427). Dengan cara pandang demikian maka implikasinya adalah perhatian utama ditujukan pada persoalan pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan perkapita, produktifitas di pasar global dan lain sebagainya. Adapun perhatian terhadap lingkungan tersubordinasi di bawah tujuan besar pertumbuhan ekonomi tersebut. Dalam kondisi seperti itu maka peran institusi negara menjadi sangat sentral menentukan kebijakan terkait lingkungan seperti apa yang dianggap sejalan dengan tujuan pembangunan (*development*). Dalam banyak kasus terlihat jelas keengganan negara untuk

Mencermati persoalan lingkungan global jelas terlihat hampir semuanya merupakan dilema *collective goods* dimana negara-negara menikmati manfaat dari lingkungan hidup yang terjaga dengan baik namun di sisi lain sebuah negara juga mendapat keuntungan (ekonomi) yang lebih dengan melanggar kesepakatan bersama mengenai lingkungan yang lebih dikenal dengan sebutan *free riders*. Dalam hal ini yang paling banyak mendapat sorotan adalah negara-negara dengan ekonomi yang sedang melaju pesat seperti China. Tujuan mengejar pembangunan ekonomi memberi dampak yang sangat besar bagi lingkungan, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya

alam serta proses industri yang massif menghasilkan polusi dan sampah juga dalam jumlah yang besar. Pecemaran, volume sampah yang dihasilkan oleh negara industri tidak hanya berdampak secara domestik tapi berimplikasi secara global.

Membahas dampak pembangunan dan aktifitas ekonomi khususnya industri terhadap lingkungan tentu akan membahas Kuznets Curve sebagai salah satu teori yang sangat relevan. Dalam tulisannya Acemoglu dan Robinson (2002) membahas secara spesifik mengenai Politik Ekonomi dari Kuznets Curve. Pada dasarnya curva ini menunjukkan bahwa semakin cepat laju pertumbuhan industri sebuah negara, semakin tinggi juga tingkat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Namun tidak berhenti sampai disitu hipotesis Kuznets mengatakan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan per kapita sebuah negara, maka akan tiba satu fase Post-industrial dimana tingkat kerusakan lingkungan akan menurun.

Gambar 1. Kurva Kuznets



Pembatasan Pembangunan

Dalam karyanya yang monumental berjudul *Limits to Growth*, Donella Meadows mengajukan argument bahwa sejak sekitar akhir 1970-an bumi sudah tidak mampu untuk menyediakan sumberdaya bagi manusia serta menyerap emisi dari aktifitas manusia dalam mengkonsumsi sumberdaya tersebut, (Meadows., et al. 1972:5). Kondisi yang demikian akan menciptakan krisis lingkungan yang saling terkait satu sama lain. Pertumbuhan populasi manusia yang eksponensial serta pertumbuhan industri untuk memenuhi kebutuhannya menciptakan kondisi dimana bumi tidak sanggup lagi menyokong tuntutan kebutuhan

tersebut dan diperparah dengan ketidak mampuan untuk menampung limbah dari aktifitas manusia tersebut (*exceeding carrying capacity and productive capacity*). Burchill et al. (2005: 240) menyebut bahwa meskipun perhitungan angka-angka yang diajukan Meadows relatif mudah dibantah, namun penganut Green Politics tetap mengambil kesimpulannya bahwa pertumbuhan eksponensial (baik populasi maupun ekonomi) adalah hal yang mustahil berlangsung secara berkelanjutan dalam sistem yang terbatas karena dianggap sangat logis. Alasan kaum ekologis untuk menempatkan kesimpulan tersebut sebagai inti dari argument mereka adalah antara lain karena solusi teknologi dianggap hanya mampu menunda krisis, pertumbuhan eksponensial yang terjadi pada populasi manusia dan pertumbuhan ekonomi hanya akan menunggu waktu untuk menjadi bencana besar. Yang terakhir, masalah terkait pertumbuhan ini sifatnya sangat rumit, terkait satu dengan yang lain. Penanganan masalah satu per satu hanya mengubah bentuk masalah, tidak akan membawa penyelesaian. Satu-satunya jalan hanya dengan membatasinya.

Negara dan Rezim Lingkungan Internasional
Winarno (2017) menyatakan kerusakan lingkungan disebabkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang merupakan konsekuensi dari kompetisi ekonomi tanpa batas. Penulis berfokus pada reaksi komunitas internasional terhadap isu krisis lingkungan dalam kerangka kerjasama di dalam rezim-rezim lingkungan internasional. Studi ini berfokus pada munculnya berbagai bentuk kerjasama baik di tingkat regional maupun internasional, serta mengukur efektivitas dari institusi-institusi tersebut. Kesimpulan yang diambil kemudian bahwa diperlukan solusi alternatif selain *international regime* karena institusi-institusi tersebut tidak efektif. Keengganan negara-negara untuk patuh pada rezim-rezim tersebut adalah konsekuensi dari kompetisi ekonomi yang tidak terelakkan di antara negara-negara dalam system ekonomi kapitalisme yang mendominasi dunia. Sayangnya, penelitian ini tidak secara jelas menguraikan solusi alternative yang dimaksud.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur yang berasal dari berbagai sumber terutama buku dan jurnal penelitian ilmiah mengenai topik terkait

kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori/perspektif. Dengan demikian data yang berhasil dikumpulkan dapat dipahami secara lengkap dan menyeluruh. Pendekatan kualitatif tersebut bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pemikiran politik hijau memberikan alternatif pandangan mengenai persoalan lingkungan dan penyelesaiannya.

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Rahardjo, M. (2010).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada akhir tahun 2019 sebuah laporan penelitian oleh beberapa ilmuwan yang tergabung dalam LSM IPEN bekerja sama dengan beberapa LSM lain seperti NEXUS3, ARINIKA dan ECOTON menjadi perbincangan dan pemberitaan di berbagai media baik nasional maupun internasional. Dalam laporan penelitian mengenai pencemaran rantai makanan di Indonesia akibat pembakaran sampah plastik, Petrlik, Ismawati, DiGangi, Arisandi, Bell dan Beeler (2019:3) mengungkapkan temuan-temuan yang mengejutkan. Fakta-fakta penting dari studi tersebut antara lain bahwa terdapat konsentrasi yang signifikan dari bahan-bahan kimia berbahaya termasuk dioksin, *polychlorinated biphenyls* (PCBs), *polybrominated diphenyl ethers* (PBDEs), *short-chain chlorinated paraffins* (SCCPs), dan *perfluorooctane sulfonate* (PFOS). Bahan-bahan kimia tersebut telah diregulasi secara global di bawah Konvensi Stockholm. Adapun kandungan dioksin dalam sampel telur ayam dari Desa Tropodo, di Sidoarjo, Jawa Timur merupakan konsentrasi kedua tertinggi dari dioksin dalam telur dari Asia yang pernah diukur. Konsentrasi dioksin dalam telur dari Tropodo (200 pg TEQ g-1 lemak) hampir sama dengan konsentrasi tertinggi dioksin dalam telur dari Asia yang pernah tercatat (248 pg TEQ g-1 lemak) yang diambil dari situs Bien Hoa di Vietnam, bekas pangkalan udara Militer AS dimana tanah di desa tersebut terkontaminasi oleh racun historis Agent Orange. Selain itu, telur dari Tropodo dan Bangun juga mengandung SCCPs dan

PBDEs, bahan kimia penghambat nyala yang digunakan dalam plastik.

Dimensi internasional dari isu pencemaran di Desa Tropodo dapat ditelusuri dengan melihat dinamika permasalahan sampah plastik antar negara. Setahun sebelum kasus Tropodo mengemuka, Cina telah menutup pintu terhadap sampah plastik impor yang datang dari AS dan negara-negara Eropa Barat. Januari 2018, setelah 25 tahun menerima sampah plastik, Cina memutuskan berhenti. Mereka hanya menerima bijih plastik yang kemurniannya diatas 99.5 persen. Sebagai akibatnya, terjadi penumpukan sampah plastik di negara-negara seperti AS, Inggris dan Australia. Asia Tenggara kemudia menjadi daerah tujuan baru ekspor untuk negara industri maju yang merupakan penghasil sampah plastik terbesar, masalah lain muncul karena daya serap industry pengolahan sampah di negara-negara Asia Tenggara tidak sebesar daya serap Cina. Penumpukan Kembali terjadi, National Geographic (2018).

Terkait langsung dengan dinamika internasional tersebut, pada tahun 2018, volume sampah plastik yang diimpor oleh Indonesia meningkat dua kali lipat menjadi 320.000ton dibandingkan tahun 2017. Laporan IPEN tersebut juga menyebut lima besar *top exporters* sampah plastik ke Indonesia pada tahun 2018 adalah Australia, Jerman, Marshall Islands, Belanda, dan AS. Sebagai tambahan, Indonesia sendiri menghasilkan 9 juta ton sampah plastik per tahun. Laporan studi Bank Dunia mencatat bahwa secara virtual tidak ada upaya penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Indonesia dan daur-ulang secara umum dilakukan oleh sektor informal (15% dari total sampah) sementara itu sistem daur-ulang formal menyerap hanya 5% dari total timbulan sampah. Sampah plastik berakhir di sungai-sungai dan mewakili secara signifikan proporsi dari puing-puing yang diangkat dari sungai, badan-badan air di semua kota, berkisar antara 20% sampai 38%. (Petrlik, Ismawati, DiGangi, Arisandi, Bell dan Beeler, 2019: 6)

Environmentalisme

Dua arus utama pemikiran dalam HI yakni Environmentalisme dan Ekosentrisme (Pemikiran Politik Hijau) sangat relevan digunakan untuk menganalisa isu lingkungan seperti kasus pencemaran oleh limbah plastik di Jawa Timur ini. Pertama Environmentalisme, pendekatan yang digambarkan sebagai sebuah pandangan optimistik

kaum modernis terhadap lembaga-lembaga yang menyusun struktur sosial yang ada. *“Environmentalists accept the framework of the existing political, social, economic and normative structures of world politics, and seek to ameliorate environmental problems within those structures”* (Burchill et al. 2005: 236). Pandangan ini sebenarnya bukan satu aliran baru dalam HI, karena argumen yang dibangun sangat identik dengan yang diajukan oleh neo-liberalisme atau liberalisme institusional. Ide mengenai interdependensi kompleks yang mengarahkan negara untuk bekerja sama dalam kerangka institusi internasional karena mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari bekerjasama. Perhatikan bahwa dalam pandangan ini negara tetap adalah aktor dominan yang paling menentukan. Optimisme pada rezim internasional adalah karena pandangan bahwa negara-negara adalah aktor rasional yang membutuhkan seperangkat norma dan aturan untuk membatasi tindakan atau memastikan peran semua negara berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Rezim lingkungan hidup adalah seperangkat norma yang dibutuhkan untuk menjadi pijakan bagi terbangunnya *trust* dalam kerangka institusional. Dengan demikian persoalan lingkungan akan lebih mudah diselesaikan secara kolektif karena perilaku negara menjadi bisa diprediksi, berkat *binding* oleh norma dan aturan yang disepakati bersama. Sejalan dengan pemikiran Abbot dan Snidal (2005: 421) bahwa *“international actors choose to order their relations through international law and design treaties and other legal arrangements to solve specific substantive and political problems”*. Salah satu rezim internasional yang terbaru dan relevan dengan masalah sampah plastik adalah Konvensi Basel. Konvensi yang digagas di bawah prakarsa United Nations Environment Program (UNEP) ini pertama-tama menetapkan jenis-jenis zat kimia apa saja yang digolongkan sebagai limbah yang berbahaya (*hazardous waste*). Lalu mengemukakan konsep *environmentally sound management* dengan tiga langkah yakni usaha meminimalisir dihasilkannya limbah, pengelolaan limbah sedekat mungkin dengan tempatnya dihasilkan, serta mengurangi perpindahan limbah antar negara (UNEP, 2002:2-3).

Sejalan dengan kepercayaannya pada rezim internasional, kaum environmentalis juga mengusung modernisme yang percaya bahwa kemampuan manusia beradaptasi dengan lingkungan, menaklukkan alam dengan ilmu

pengetahuan dan teknologi juga akan berlaku atas masalah-masalah lingkungan. Berlandaskan pemikiran environmentalist tersebut, Konvensi Basel menyebut modernitas (Environmentalis juga sering disebut sebagai Kaum Modernis) dan kemajuan industri membawa dampak yang menguntungkan bagi umat manusia. Tiga Langkah environmentally sound management yang dirumuskan dalam Konvensi Basel juga sangat kental dengan optimisme modernis. Bahkan mereka meyakini bahwa proses industri yang bersih itu dapat menekan biaya produksi sembari mengurangi dampak buruk bagi lingkungan, (UNEP, 2002: 6) Adapun jika tetap ada kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dari proses industrial tersebut dianggap sebagai efek samping yang perlu dicari solusinya lagi-lagi dengan teknologi dan kerjasama intitusional.

Ekosentrisme

Sementara itu para pemikir Politik Hijau justru melihat tatanan struktur politik, sosial dan ekonomi yang ada justru merupakan sumber dari permasalahan krisis lingkungan. Burchil et al. (2005:236) menegaskan, "*Greens regard political, social, and economic structures as the main origin of the environmental crisis and therefore contend that they are structures which need to be challenged and transcended*". Pandangan seperti ini menjelaskan krisis lingkungan di Desa Tropodo, Jawa Timur sebagai hasil dari praktek-praktek ekonomi yang dilakukan oleh negara dalam struktur perekonomian global. Dalam pandangan ini institusi-institusi global bukan solusi melainkan bagian dari permasalahan (Steans dan Pettiford, 2009:381). Selanjutnya mengenai optimisme kaum modernis mengenai kemampuan manusia berbekal ilmu pengetahuan dan teknologinya untuk menjadi solusi bagi krisis lingkungan, penganut pemikiran Politik Hijau dengan tegas menolak ide tersebut. Menurut mereka degradasi lingkungan justru terjadi akibat mengikuti solusi-solusi berdasarkan ilmu pengetahuan modern.

Pertumbuhan ekonomi yang dibangun diatas asumsi-asumsi dasar ekonomi liberal mengedepankan prinsip efisiensi dengan peningkatan produktifitas sebagai indikator utamanya. Seperti laporan Vice (2019), Para pembuat tahu di Desa Tropodo memanfaatkan limbah plastik sebagai pengganti bahan bakar kayu yang selama ini dipakai demi menekan biaya

produksi. Harga plastik yang dikirim ke Tropodo hanya sepersepuluh ongkos memakai kayu bakar.

Sampai pada titik tersebut terlihat penjelasan Kurva Kuznets masih relevan dan sejalan dengan pemikiran politik hijau, namun ketika tiba pada pandangan bahwa negara-negara post-industrial terjadi penurunan kerusakan lingkungan hidup, akibat dari keunggulan teknologi dan tingginya pendapatan perkapita menghasilkan kemampuan penduduknya untuk menjalankan gaya hidup yang lebih pro lingkungan, maka Analisa pemikiran politik hijau akan berbeda. Pandangan bahwa negara-negara industri maju dengan GDP yang tinggi seperti negara-negara Eropa Barat, Australia, serta Amerika Serikat berkontribusi lebih sedikit pada masalah pencemaran atau kerusakan lingkungan terbantahkan oleh fakta bahwa limbah plastic yang dikirimkan melintasi batas kenegaraan adalah berasal dari negara-negara tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan, mereka hanya memindahkan pencemaran, atau beban kerusakan lingkungan dari negara mereka ke negara dengan ekonomi yang lebih lemah. Secara esensial mereka tetap berkontribusi besar pada kerusakan lingkungan secara global. Meskipun terlihat lingkungan di negara-negara tersebut relative lebih bersih dibandingkan negara-negara berkembang.

Lebih jauh lagi, argumen ekosentrime yang menunjuk pembangunan sebagai sumber permasalahan juga didukung dengan fakta bahwa industri berteknologi tinggi yang menjadi spesialisasi negara-negara industry maju justru menghasilkan limbah yang lebih berbahaya dibandingkan industri rumahahan atau industri-industri kecil. Limbah beracun serta yang bersifat radio aktif dihasilkan oleh industri elektronik. Dampaknya per negara mungkin menjadi bias akibat dari sistem pembagian kerja internasional. Dimana produksi barang-barang tesebut dilaksanakan di negara berkembang karena mengejar buruh murah, sehingga limbahnya banyak ditanggung oleh negara host dari aktifitas MNCs secara global.

Secara pilosofis, perbedaan paling besar antara pemikiran kaum environmentalis dengan kaum ekologis terletak pada pandangan mengenai posisi relatif manusia terhadap alam. Jika environmentalis mengusung pandangan antropsentrisme dimana manusia adalah pusat dari alam, maka kaum ekologis mengatakan manusia

hanya salah satu komponen dari alam, bukan pusatnya. Alam dilihat sebagai sebuah unit yang didalamnya dunia manusia dan non-manusia dilihat sebagai satu kesatuan. “*A central tenet of Green thought is the rejection of anthropocentric ethics in favour of an ecocentric approach*” (Burchill et al. 2005: 249). Konsekuensi dari penolakan terhadap antroposentisme adalah munculnya gagasan bahwa dunia non-manusia harus dihargai setingkat dengan kepentingan dunia manusia. Dalam hal ini penyebutan sebagai salah satu teori emansipatoris bagi Pemikiran Politik Hijau menjadi relevan. Emansipasi lingkungan menjadi sejajar, bukan ter subordinasi di bawah kepentingan dunia manusia dianggap sebagai landasan dari tindakan yang mungkin mengarah pada penghentian perusakan lingkungan oleh manusia.

Krisis Lingkungan Tropodo dan Ide Pembatasan Pertumbuhan

Hal yang menarik dari pemikiran Politik Hijau adalah penolakannya terhadap strategi pembangunan yang terlalu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pada kasus sampah plastik yang kemudian mencemari Desa Tropodo di Jawa Timur, terdapat fakta menarik yang dapat dianalisa. Dimensi ketimpangan ekonomi antar negara menjadi pembeda kasus Tropodo dengan kasus penolakan terhadap limbah yang berasal dari Italia oleh negara-negara Eropa Barat yang lain pada 1988. Ketimpangan ekonomi antara Indonesia sebagai negara tujuan limbah plastik dengan AS, Kanada maupun Australia memuluskan terjadinya perpindahan limbah tersebut. Dengan alasan efisiensi dan “saling menguntungkan” maka sampah plastik bisa masuk ke Indonesia dengan relatif mudah. Bandingkan dengan penolakan Inggris, Perancis, Spanyol, Jerman dan Belanda terhadap limbah dari Italy. Karena semua negara tersebut secara ekonomi relatif seimbang maka tidak ada kondisi dependensi yang memaksa negara tujuan menerima sampah yang berbahaya tersebut.

Karakteristik lain dari masalah pencemaran di Tropodo adalah fakta bahwa pembahasan mengenai limbah secara internasional misalnya dalam Konvensi Stockholm atau Konvensi Basel menitikberatkan pada limbah berbahaya (*hazardous waste*) sementara sampah plastik yang masuk ke Indonesia diimpor sebagai bahan baku

(input) pada industri pengolahan plastik dan kertas daur ulang. Bahan plastik yang juga bercampur dengan limbah kertas tentu belum dapat dikategorikan sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3). Bahkan dari perspektif industri, plastik yang diimpor tersebut bukan limbah melainkan bahan baku produksi. Kondisi ini membuka celah yang bisa diperdebatkan. Bahan-bahan kimia berbahaya termasuk seperti dioksin, *polychlorinated biphenyls* (PCBs), *polybrominated diphenyl ethers* (PBDEs), *short-chain chlorinated paraffins* (SCCPs), dan *perfluorooctane sulfonate* (PFOS) yang ditemukan dalam sampel telur ayam di Desa Tropodo baru dirilis ke alam ketika masyarakat terutama produsen tahu menggunakan sisa plastik yang tidak bisa didaur ulang sebagai bahan bakar dalam proses pembuatan tahu. Fakta ini tentu menjadi kesulitan lain dalam menangani permasalahan ini dengan pendekatan institusi atau rezim internasional.

Oleh karena itu, penulis melihat argumen Politik Hijau mengenai pembatasan pertumbuhan menjadi relevan dalam kasus Tropodo. Pertumbuhan ekonomi yang dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi kapitalisme dengan pengejaran keuntungan melalui efisiensi maksimal pada proses produksi. Penggunaan limbah plastik sebagai bahan bakar tentu sejalan dengan prinsip ini. Jika fokus hanya pada pembangunan ekonomi tidak ada yang salah dengan praktek seperti ini. Praktek ini juga sejalan pembangunan industri yang berdaya saing karena dengan menekan biaya produksi, industri-industri tahu rumahan tersebut akan dimungkinkan untuk menjual produk mereka dengan harga yang kompetitif (lebih murah). Sementara itu di sisi lain, perusahaan-perusahaan raksasa dari negara industri maju juga terus menerus berproduksi bahkan meningkatkan produksinya dari waktu ke waktu, hal ini berarti sampah yang mereka hasilkan juga akan semakin banyak. Selain itu argument yang dibangun dalam Konvensi Basel bahwa *cleaner production* justru menekan biaya produksi cukup sulit diterima, (UNEP, 2002: 6) Menciptakan atau membeli mesin-mesin yang bekerja sedemikian efisien sehingga meminimalisir terciptanya limbah tentu membutuhkan teknologi dan biaya lebih mahal. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa mengelola limbah sampai pada level yang tidak berbahaya bagi lingkungan berarti tambahan beban bagi industri, sehingga opsi membuang limbah jelas lebih efisien dari sudut pandang bisnis. Di titik inilah kritik ekologisisme dan ide pembatasan

pertumbuhan menjadi relevan. Industri raksasa di negara maju mesti ditekan untuk mengurangi produksinya demi mengurangi limbah yang dihasilkan. Sementara industri kecil di negara seperti Indonesia juga harus memiliki kesadaran bahwa efisiensi dan pengejaran keuntungan maksimal mestinya tidak lagi menjadi satu-satunya perhatian. Kerusakan lingkungan adalah ancaman nyata tidak hanya pada lingkungan semata tetapi juga mengancam keselamatan manusia dan pada akhirnya, industri itu sendiri. Dengan demikian, argumen Ekosentrisme bahwa manusia tidak bisa dipisahkan dari dunia non-manusia, bahwa manusia hanyalah salah satu bagian dari kesatuan alam yang harus dilihat sebagai satu unit menjadi sangat relevan.

5. KESIMPULAN

Ketika negara-negara saling menuding dan para penggiat serta ahli berdebat soal siapa yang lebih banyak bersalah atas pencemaran, pendekatan Politik Hijau keluar dari frame struktur negara dan institusi internasional kemudian menunjukkan bahwa mereka sendiri, negara-negara adalah sumber masalahnya. Selain itu, regulasi dan norma yang diatur dalam rezim-rezim internasional selalu memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemilik modal. Penulis melihat bahwa argumen kaum ekologis yang meyakini negara serta pembangunan yang terus dikejanya adalah sumber masalah dapat dengan jelas terlihat dalam kasus Tropodo. Bahkan alur berpikir kurva Kuznets yang menyatakan semakin tinggi pendapatan perkapita sebuah negara, atau semakin mapan industrinya maka akan semakin kecil kecenderungan untuk merusak lingkungan dapat dikatakan keliru. Sekilas terlihat bahwa secara domestik negara-negara tersebut lebih bersih, dengan industri hijau ramah lingkungan namun dengan menggunakan perpektif kritis kita dapat melihat bahwa negara-negara industri maju hanya memindahkan efek buruk dari industri di negara mereka ke negara lain. Mengirimkan sampah ke negara lain adalah upaya menghindari pencemaran di negara sendiri dengan

membiarkan negara yang lebih lemah dalam struktur ekonomi global menjadi pihak yang menanggungnya.

Upaya negara melalui proyek-proyek pembangunan pengolahan limbah serta mendukung industri yang memanfaatkan limbah hanya merupakan upaya untuk menangani “gejala” bukan berfokus pada sumber masalah. Di sisi lain, kompetisi pasar global yang sangat sengit memunculkan kecenderungan negara-negara untuk menjadi *free riders* dimana negara-negara justru mengambil keuntungan dengan melanggar norma-norma aturan dalam regim internasional demi kepentingan nasional jangka pendeknya. Pada akhirnya kondisi tersebut berpengaruh pada efektifitas institusi internasional.

Kelemahan dari perspektif Politik Hijau-sebagaimana kecenderungan perpektif kritis-adalah tidak adanya solusi konkrit yang ditawarkan untuk penyelesaian masalah lingkungan. Penolakan mereka pada fungsi institusi negara membuat analisa dan alternatif yang ditawarkan nampaknya menjadi tidak relevan dengan realitas dunia yang ada. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa analisa kaum ekosentris tidak memiliki kontribusi pada upaya penanganan masalah pencemaran lingkungan. Penulis melihat bahwa kritik Politik Hijau atas konsep pembangunan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta struktur ekonomi global yang timpang antar negara dapat menjadi poin yang sangat krusial dan penting untuk benar-benar dipikirkan karena mampu menunjukkan sumber masalah. Dalam hal ini mengajukan pertanyaan yang benar mengenai apa penyebab sebuah masalah tidak kalah penting, atau bahkan lebih penting dari memberikan solusi yang cepat terhadap masalah tersebut. Dalam kasus pencemaran lingkungan di Tropodo Jawa Timur ini contohnya, berfokus pada solusi penyelesaian masalah adalah sebuah usaha yang sia-sia jika tidak terlebih dahulu memahami sumber masalahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, K. W., & Snidal, D. (2000). Hard and Soft Law in International Governance. *International Organization*, 43, 3 Summer, 421-456 diakses 3 Mei 2020 dari <http://www.eastlaw.net/wp-content/uploads/2016/09/Legalization-hardlawsoftlaw.pdf>
- Acemoglu, D. & Robinson, J.A.(2002). The Political Economy of the Kuznets Curve. *Review of Development Economics*, 6 (2), 183-203. Diakses 20 Mei 2020 dari https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/908_jr_kuznets.pdf
- Burchill, S. et al. (2005). *Theories of International Relations*. Palgrave Macmillan, New York.
- Goldstein, J.S. (2014) *International Relations*. Pearson Education, Essex.
- Greenhouse, S. (1988). Toxic Waste Boomerang: Ciao Italy! *The New York Times*. Diakses 1 Juni 20120 dari <https://www.nytimes.com/1988/09/03/world/toxic-waste-boomerang-ciao-italy.html>
- Hastanto, I. (November, 2019). Desa di Jatim Terkontaminasi Racun Perang Vietnam, Pakai Plastik Buat Produksi Tahu. *Vice*. Diakses Mei 2020 dari https://www.vice.com/id_id/article/8xwpm4/desa-tropodo-di-jatim-terkontaminasi-racun-perang-vietnam-pemicu-kanker-karenapakai-plastik-buat-produksi-tahu.
- Kuznets, S. 1955. Economic Growth and Income Inequality. *The American Economic Review*, Vol. 45, No. 1. pp. 1-28. Diakses 20 Mei 2020 dari <http://gabriel-zucman.eu/files/teaching/Kuznets55.pdf>
- Meadows, D. et al (2004) *Limits to Growth: The 30-Year Update*. Green Publishing Company, White River Junction, VT.
- Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif* (<https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>)
- Parker, L. (November, 2018) *China's ban on trash imports shifts waste crisis to Southeast Asia*. *National Geographic*. Diakses 20 Mei 2020 dari <https://www.nationalgeographic.com/environment/2018/11/china-ban-plastic-trash-imports-shifts-waste-crisis-southeast-asia-malaysia/>
- Petrlik, J., Ismawati, Y., DiGangi, J., Arisandi, P., Bell, L., dan Beeler, B. 2019. Sampah Plastik Meracuni Rantai Makanan Indonesia. www.ipen.org
- Rahardjo, M. (2010). Triangulasi dalam Pendekatan Kualitatif. Diakses 10 Maret 2020 dari <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- UNEP. (2002). *Minimizing Hazardous Wastes: A Simplified Guide to The Basel Convention*. Secretariat for The Basel Convention, Geneva.
- Winarno, B. 2017. The value of international regime and global environmental crisis. *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 6 No.1, 81-98

Verity - UPH Journal of International Relations

Faculty of Social and Political Science

Pelita Harapan University

Viotti, P.R. & Kauppi, M.V. (2012) *International Relations Theory* (5th Edition). Pearson Education Inc.